

INDEF POLICY BRIEF No. 1/2025

**WINNING A GAME THAT WE SHOULD EASILY WIN:
SEIZING THE POTENTIAL OF SHARIA ECONOMICS AND FINANCE**

Januari 2025

Nur Hidayah¹, Abdul Hakam Naja², Handi Risza², Izzudin Al Farras Adha³, Lintang Putri Titian³,
Muhammad Alfatih Murod⁴¹ Kepala Center of Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)² Peneliti Associate, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)³ Peneliti, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)⁴ Asisten Peneliti, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)**Ringkasan Eksekutif**

Tahun-tahun mendatang menjadi periode penuh tantangan bagi Indonesia akibat ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh dampak pandemi Covid-19, konflik geopolitik, dan tensi perdagangan global. Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia harus memaksimalkan potensi domestik untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah telah merumuskan "Asta Cita" sebagai visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, yang menjadi landasan dalam menyusun RPJMN 2025–2029. Salah satu fokus utama adalah pengembangan ekonomi syariah, yang untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan nasional. Langkah ini mencerminkan semakin diakuinya potensi besar ekonomi syariah di Indonesia dan hal ini didukung oleh peningkatan signifikan dalam peringkat *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI).

Namun, meskipun Indonesia menempati peringkat ketiga GIEI 2023, terdapat kesenjangan besar dengan Malaysia sebagai pemuncak. Untuk mencapai target peringkat pertama pada 2029, diperlukan percepatan pengembangan ekonomi syariah. Faktor-faktor strategis seperti populasi Muslim terbesar kedua di dunia, tingginya potensi sektor UMKM, dan kisah sukses perusahaan lokal berbasis halal menjadi keunggulan Indonesia. Selain itu, potensi besar dari sektor keuangan sosial Islam dan industri halal yang terus berkembang secara global memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama di pasar internasional.

Pemerintah perlu mengambil langkah taktis, termasuk pengesahan regulasi afirmatif, peningkatan pembiayaan syariah untuk UMKM, dan akselerasi pelaksanaan RPJMN terkait ekonomi syariah. Langkah-langkah strategis ini akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar halal global, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi syariah yang ada, Indonesia dapat mewujudkan ambisi sebagai pemimpin ekonomi syariah global, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

1. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun ke depan merupakan tahun-tahun yang relatif tidak mudah bagi hampir seluruh negara di dunia. Kondisi ini disebabkan oleh perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19, kemudian diperparah dengan dampak pecahnya Perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda selesai dalam waktu dekat, dan baru-baru ini diperburuk dengan meningkatnya sentimen negatif atas isu perang dagang antara Amerika Serikat dan China pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-47, serta konflik di Timur Tengah yang terus membara dari hari ke hari. Ketidakpastian perekonomian global memaksa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk dapat lebih bergantung pada kemampuan dalam negerinya masing-masing. Menggantungkan stabilitas dan perkembangan kondisi perekonomian domestik pada kondisi perekonomian global adalah sesuatu yang *non-sense* untuk saat ini, sehingga untuk dapat *survive* di tengah kondisi perekonomian saat ini dan kedepan mau tidak mau setiap negara harus mampu berdiri di atas kakinya masing-masing dengan cara memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Hal ini pula yang kemudian disadari oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang terpilih pada kontestasi pemilu 2024 lalu dan kemudian dituangkan ke dalam Asta Cita. Asta Cita sendiri merupakan misi yang diusung untuk memetakan arah pembangunan Indonesia menjelang 2045, atau lebih dikenal sebagai “Indonesia Emas 2045”. Nama Asta Cita diambil dari delapan poin utama dalam misi yang berfokus pada berbagai aspek pembangunan nasional dan Asta Cita inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menyusun prioritas nasional RPJMN 2025-2029. Poin-poin Asta Cita adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, **ekonomi syariah**, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbagai sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Apabila kita perhatikan, maka kita akan menemukan ekonomi syariah terdapat dalam asta cita tersebut yang berarti bahwa ia juga terdapat dalam prioritas nasional RPJMN 2025-2029. Ini merupakan pertama kalinya ekonomi syariah secara resmi masuk ke dalam dokumen rancangan pembangunan nasional, menandakan bahwa eksistensi potensi dari ekonomi syariah yang semakin diakui saat ini.

Berbicara mengenai kiprah ekonomi syariah di Indonesia dapat kita ketahui salah satunya dari capaian Indonesia dalam *State of Global Islamic Economy* (SGIE) 2023/2024. SGIE sendiri merupakan sebuah terminologi yang ramai diperbincangkan pasca debat calon wakil presiden ketiga pemilu 2024. Bagi ekonomi syariah, ini merupakan berkah tersendiri karena dengan hal tersebut pembahasan mengenai ekonomi syariah dapat naik kepermukaan dan kemudian diikuti dengan meningkatnya *awareness* masyarakat mengenai ekonomi syariah dan potensi yang dimilikinya.

Tabel 1. Global Islamic Economy Index 2023/2024

Country	GIEI Scores	Rank					
		Islamic Finance	Halal Food	Travel	Fashion	Media & Recreation	Pharma & Cosmetics
Malaysia	193,2	1	1	5	2	1	3
Arab Saudi	93,6	2	-	4	-	-	-
Indonesia	80,1	7	2	-	3	6	5
UAE	79,8	6	7	2	-	-	-
Bahrain	75,0	4	10	8	8	7	-

Sumber: *State of Global Islamic Economic Report*, Dinar Standard (2023)

Berdasarkan laporan SGIE 2023/2024, Indonesia menempati peringkat ketiga secara keseluruhan dari aspek-aspek yang dinilai dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023 yang sebelumnya berada di peringkat empat dalam penilaian periode sebelumnya. Hal ini merupakan capaian yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tetapi jika kita lihat dalam kategori per sektor, sektor *modest fashion* berada di peringkat ke-3, sektor *islamic finance* berada pada peringkat ke-7, sektor *halal food* di peringkat ke-2, sektor *media & recreation* di peringkat ke-6, dan sektor *pharma & cosmetics* di peringkat ke-5. Adapun untuk sektor *muslim friendly travel* pada laporan kali ini belum cukup signifikan untuk dihitung dalam pasar global. Berdasarkan RPJMN 2025-2029, peringkat GIEI Indonesia yang semula peringkat tiga di tahun 2023, ditargetkan menjadi peringkat pertama di tahun 2029. Ini merupakan target yang besar mengingat untuk dapat menduduki peringkat pertama Indonesia harus dapat menggeser Malaysia yang saat ini menduduki peringkat pertama. Indonesia harus dapat mengalahkan skor GIEI Malaysia yang mana dalam laporan terakhir, skor Indonesia sebagai peringkat ketiga kurang lebih hanya sepertiga dari skor Malaysia sebagai peringkat pertama.

2. PEMBAHASAN

Pertandingan yang Menantang untuk Dimenangkan

Meskipun Indonesia mengalami peningkatan signifikan skor dan peringkat GIEI dalam beberapa tahun terakhir, namun Indonesia tidak boleh berpuas diri. Skor GIEI Indonesia tahun 2023 sebesar 80,1 masih jauh di bawah skor GIEI Malaysia sebesar 193,2 pada tahun yang sama. Skor pada subsektor Islamic Finance semakin menunjukkan angka yang sangat timpang, dimana Indonesia memiliki skor 93,2 dan Malaysia dengan skor 408,7. Artinya, Indonesia tidak hanya harus terus meningkatkan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, tetapi juga harus melakukan percepatan peningkatan atau akselerasi agar mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Terlebih, Apabila kita meninjau berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem ekonomi syariah, untuk menduduki peringkat pertama GIEI di tahun 2029 sebenarnya merupakan pertandingan yang relatif mudah untuk dimenangkan oleh Indonesia. Hal ini didasari oleh beragam faktor potensi yang dimiliki oleh Indonesia yang sejatinya hanya menunggu waktu untuk diwujudkan lewat dukungan pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Faktor yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dengan jumlah mencapai 245 juta jiwa atau setara dengan 87,08 persen dari total penduduk Indonesia¹. Jumlah ini setara dengan 13 persen total muslim di dunia, yang mengantarkan Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia setelah Pakistan. Jumlah yang banyak ini didukung dengan survei yang mengatakan bahwa 98 persen penduduk muslim di Indonesia mengatakan bahwa *religion* sangat penting dalam hidup mereka². Kombinasi jumlah muslim yang banyak dan mayoritas menganggap bahwa *religion* sangat penting dalam hidup mereka merupakan kombinasi yang menjanjikan bagi tumbuh kembang pasar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Faktor yang kedua adalah adanya jejak historis berkaitan dengan ukuran, karakteristik, dan preferensi nilai-nilai masyarakat Muslim di Indonesia yang telah melahirkan sejumlah perusahaan lokal besar yang sukses meraih pendapatan setidaknya mencapai pendapatan US\$500 juta per tahun di sektor makanan, farmasi, dan kosmetik. Beberapa contohnya adalah Indofood, Mayora, GarudaFood, dan Kimia Farma. Hal ini juga menarik perhatian perusahaan multinasional seperti Unilever dan L'Oréal untuk mendirikan bisnis lokal di dalam negeri³. Perusahaan-perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai halal dan telah menjadi *local champion* tersebut dapat kemudian didukung oleh pemerintah agar dapat menjadi pemain global yang signifikan dan mempercepat kemenangan Indonesia dalam pertandingan ini.

Salah satu upaya yang pemerintah dapat lakukan untuk mendukung usaha lokal menjadi pemain global adalah melalui pembiayaan UMKM. Pasaunya, UMKM merupakan 99 persen

¹ Data Kependudukan Bersih Indonesia Semester 1 Tahun 2024, Dirjen Dukcapil (2024)

² Buddha, Islam, dan Pluralisme Agama di Asia Selatan dan Asia Tenggara, Pew Research Center (2023)

³ Indonesia Halal Market Report 2021/2022

dari total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap 60,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Adapun pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM baru sebesar 17,7 persen dari total pembiayaan per September 2024 (OJK, 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pembiayaan yang lebih besar, yakni hingga 30 persen, terhadap para pelaku UMKM lokal.

Selain itu, berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024, terdapat gap yang signifikan antara jumlah ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia dalam ranah perdagangan produk halal dari dan menuju negara-negara anggota OIC. Dalam laporan SGIE Report 2023/2024, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) baru mencapai angka sebesar US\$13,38 miliar yang menempatkan Indonesia di urutan ke 8 eksportir produk halal ke negara-negara OKI pada tahun 2023. Sedangkan di sisi lain, Indonesia telah melakukan impor produk halal senilai US\$30,29 miliar yang menempatkan Indonesia di peringkat 4 besar importir produk halal di antara negara-negara OKI. Artinya Indonesia menjadi salah satu importir produk-produk halal terbesar di dunia. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling besar dalam hal belanja produk-produk halal dibandingkan negara-negara mayoritas muslim lainnya. Bahkan, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan China yang merupakan eksportir produk halal nomor satu di dunia dengan nilai US\$31,81 miliar yang disusul oleh India dengan nilai US\$26,37 miliar.

Industri halal telah menjadi tren global yang terdapat di hampir seluruh negara di dunia tidak hanya di negara-negara dengan penduduk muslim, tetapi telah memasuki seluruh negara di dunia. Bahkan diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Laporan SGIE 2023/2024 mencatat, besaran pengeluaran belanja masyarakat Muslim dunia pada 2022 mencapai US\$ 2,29 triliun dan diperkirakan terus tumbuh hingga US\$ 3,1 triliun pada 2027 (dengan asumsi CAGR sebesar 4,8%)⁴. Pengeluaran tersebut terjadi pada berbagai sektor makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal, dan keuangan syariah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pangsa pasar global produk halal ke depan mengandung potensi yang tidak boleh dilewatkan oleh Indonesia. Dengan menjadi pemenang dalam pertandingan ini, dapat mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di tingkat global, sejalan dengan salah satu dari lima sasaran utama RPJPN 2025-2045, yaitu meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional. Dan juga, dengan menjadi pemain besar di ranah ekosistem ekonomi dan keuangan syariah global dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru yang kemudian pada gilirannya meningkatkan konsumsi masyarakat dan signifikan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Faktor ketiga adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan berdasarkan World Giving Indeks (WGI) yang disusun oleh Charities Aid Foundation (CAF) selama tujuh tahun berturut-turut⁵. Kedermawanan orang Indonesia dapat dimanfaatkan untuk

⁴ State of Global Islamic Economy 2023/2024, DinarStandard (2023)

⁵ World Giving Index, Charities Aid Foundation (2024)

memaksimalkan potensi keuangan sosial Islam yang saban hari stagnan di tingkat realisasi yang rendah. Dengan semakin besarnya realisasi dari potensi keuangan sosial Islam diharapkan mampu untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, yang mana hal ini sejalan juga dengan salah satu sasaran utama RPJPN 2025-2045, yaitu berkurangnya ketimpangan dan menurunnya angka kemiskinan di Indonesia.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Quick Wins

Terdapat beberapa langkah cepat yang dapat diambil oleh pemerintah guna mewujudkan ambisi dalam rangka merealisasikan seluruh potensi dan mewujudkan semua peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Selain itu, beberapa langkah di bawah ini turut dapat memberikan landasan ekonomi yang kuat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang berkelanjutan.

Pertama, pemerintah harus menghadirkan kebijakan afirmatif secara terintegrasi dan berkelanjutan bagi ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini statusnya infant industry. Kebijakan tersebut ditujukan agar terdapat *level of playing field* yang setara dengan industri ekonomi dan keuangan konvensional. Sebab, mempertandingkan kedua industri ini dengan kondisi seperti pada saat ini amat tidak adil bagi industri ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan, hal ini malah menghambat atau bahkan mematikan perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua, pemerintah harus berkomitmen penuh untuk mewujudkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Setelah isu tersebut dimasukkan ke dalam rencana pembangunan nasional, pemerintah perlu mengambil langkah serius dan taktis agar rencana tersebut dapat benar-benar direalisasikan.

Ketiga, pemerintah mesti segera mengesahkan RUU ekonomi syariah yang bersifat omnibus. Akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memerlukan dasar hukum yang jelas dan dapat menjadi landasan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri keuangan syariah, dana sosial keagamaan, dan industri syariah sehingga dapat terus memperbesar skala usahanya.

Pada akhirnya, kompetisi untuk menjadi pemuncak klasemen GIEI merupakan “pertandingan yang menantang untuk dimenangkan” bagi Indonesia. Lantas dengan beragam manfaat yang datang mengikutinya, mengapa tidak Indonesia menangkan?.

DAFTAR PUSTAKA

Charities Aid Foundation. (2024). World Giving Index 2024. https://www.cafonline.org/docs/default-source/inside-giving/wgi/wgi_2024_report.pdf.

Dinar Standard. (2023). State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024. <https://www.dinarstandard.com>.

DinarStandard, Indonesia Halal Lifestyle Center, & Bank Indonesia. (2021). Indonesia Halal Markets Report 2021/2022.

Dirjen Dukcapil. (2024). Data Kependudukan Bersih Indonesia Semester 1 Tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri.

Evans, Jonathan, Kelsey Jo Starr, Manolo Corichi, dan William Miner. (2023). Agama Buddha, Islam, dan Pluralisme Agama di Asia Selatan dan Tenggara. Pew Research Center.